

Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Lamongan tahun 2025

Kharisma Firdaus^{1*}, M. Billy Multazam², dan Muhammad Mukhobbir Risalah³

¹Universitas Sunan Gresik, Gresik, Indonesia

² Universitas Sunan Gresik, Gresik, Indonesia

³ Universitas Sunan Gresik, Gresik, Indonesia

Kharisma.f@lecturer.usg.ac.id

*Email Korespondensi: kharisma.f@lecturer.usg.ac.id

Abstract (english):

Abstract: Assessments of the quality of democracy in Indonesia have largely focused on the national and provincial levels through the Indonesian Democracy Index (IDI) framework, even though the true political dynamics and variations in substantive democracy are most evident at the local level (regency/city). This study aims to measure, analyze, and compare the Democracy Index levels in Lamongan Regency and Gresik Regency in 2025 using the IDI approach. These two regions were selected because they present an interesting empirical contrast stemming from the 2024 regional head elections (Pilkada): Lamongan Regency hosted a competitive contest featuring two candidate pairs, whereas Gresik Regency experienced a single-candidate scenario facing a "blank box" (an option to vote against the sole candidate). The study employs a quantitative method involving secondary data analysis and the scoring of 22 indicators across the three main IDI dimensions: civil liberties, equality, and the capacity of democratic institutions. Index scores are processed using Analytic Hierarchy Process (AHP) weighting to generate objective local-level IDI values. The findings are expected to address theoretical debates regarding the correlation between electoral competition and the quality of substantive democracy at the local level, as well as the extent to which single-candidate phenomena affect principles of checks and balances and institutional capacity. In practical terms, the results are intended to serve as an empirical evaluation tool for local governments to formulate strategic policies aimed at enhancing the quality of democracy, freedom, equal access, and institutional performance in both Lamongan and Gresik Regencies.

Keywords: Indonesian Democracy Index (IDI), Local Democracy, Electoral Competition, Single Candidate, Lamongan Regency, Gresik Regency

Abstrak (Bahasa):

Abstrak Penilaian kualitas demokrasi di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada tingkat nasional dan provinsi melalui kerangka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), padahal dinamika politik yang sesungguhnya serta variasi dalam demokrasi substantif justru tampak nyata di tingkat lokal (kabupaten/kota). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan membandingkan tingkat Indeks Demokrasi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan IDI. Kedua wilayah ini dipilih karena menyajikan kontras empiris yang menarik dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024; Kabupaten Lamongan menggelar kontestasi yang kompetitif dengan dua pasangan calon, sementara Kabupaten Gresik mengalami fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif melalui analisis data sekunder dan pemberian skor pada 22 indikator yang mencakup tiga dimensi utama IDI (kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi). Skor indeks diolah menggunakan pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) guna menghasilkan nilai IDI

tingkat lokal yang objektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab perdebatan teoretis mengenai korelasi antara kompetisi elektoral dan kualitas demokrasi substantif di tingkat lokal, serta sejauh mana fenomena calon tunggal memengaruhi prinsip checks and balances dan kapasitas kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian ini ditujukan sebagai alat evaluasi empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi, kebebasan, akses yang setara, dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Lamongan maupun Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Demokrasi Lokal, Kompetisi Pemilu, Kandidat Tunggal, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat (Kelsen, 1952). Dalam perkembangannya, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin partisipasi politik, kebebasan sipil, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dahl (1971) melalui konsep *polyarchy* menekankan pentingnya kompetisi politik dan partisipasi masyarakat, sedangkan Schmitter dan Karl (1991) menegaskan bahwa kualitas demokrasi ditentukan pula oleh keberadaan institusi yang kuat dan supremasi hukum. Dengan demikian, demokrasi merupakan konsep multidimensional yang tidak dapat diukur hanya melalui prosedur elektoral.

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks sejak era reformasi. Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan langsung, dan desentralisasi pemerintahan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti menurunnya kebebasan sipil, menguatnya oligarki, serta praktik patronase dan klientelisme dalam politik lokal (Diamond, 2015; Aspinall & Berenschot, 2019). Penelitian Fajri et al. (2021) dan Rahmatullah (2019) juga memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi antar daerah sangat dipengaruhi oleh konteks lokal sehingga pengukuran pada tingkat kabupaten/kota menjadi semakin penting.

Salah satu indikator utama demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu yang kompetitif. Menurut Dahl (1971), kompetisi politik menjadi prasyarat bagi sirkulasi kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan. Akan tetapi, Schmitter dan Karl (1991) menegaskan bahwa pemilu saja tidak cukup menjamin kualitas demokrasi apabila tidak didukung oleh kebebasan sipil dan kelembagaan yang efektif. Dalam konteks ini, fenomena calon tunggal pada pemilihan kepala daerah menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana kompetisi elektoral benar-benar mencerminkan kualitas demokrasi substantif (Aspinall & Berenschot, 2019).

Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik pada Pilkada 2024 menghadirkan dua karakteristik politik yang berbeda. Lamongan menyelenggarakan pemilihan dengan dua pasangan calon, sedangkan Gresik hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong. Perbedaan tersebut menjadi konteks yang menarik untuk menguji apakah tingkat kompetisi elektoral berkorelasi dengan kualitas demokrasi, atau justru dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh Fajri et al. (2021).

Untuk mengukur kualitas demokrasi secara lebih objektif, penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengukur demokrasi melalui dimensi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Meskipun IDI selama ini lebih banyak diterapkan pada tingkat provinsi, pengukuran pada tingkat kabupaten/kota dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai praktik demokrasi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengukur dan membandingkan Indeks Demokrasi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik sebagai upaya memperkaya kajian demokrasi lokal sekaligus mengevaluasi hubungan antara kompetisi elektoral dan kualitas demokrasi.

Sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana tingkat Indeks Demokrasi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik tahun 2025 berdasarkan pendekatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta bagaimana pengaruh perbedaan tingkat kompetisi elektoral terhadap kualitas demokrasi di kedua daerah tersebut?



Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan tingkat Indeks Demokrasi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik tahun 2025 menggunakan pendekatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), menganalisis kontribusi dimensi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi terhadap kualitas demokrasi di kedua daerah, serta mengkaji sejauh mana tingkat kompetisi elektoral memengaruhi kualitas demokrasi lokal sebagai dasar penyusunan rekomendasi penguatan demokrasi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas demokrasi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa demokrasi merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya diukur melalui prosedur elektoral, tetapi juga melalui kualitas kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas kelembagaan. Secara teoritis, konsep ini mengacu pada *polyarchy* yang dikemukakan Dahl (1971), yang menekankan pentingnya partisipasi dan kompetisi politik, serta pandangan Schmitter dan Karl (1991) mengenai pentingnya institusi politik yang akuntabel, kebebasan sipil, dan *rule of law*. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kritik terhadap demokrasi prosedural yang menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal sering kali dipengaruhi oleh relasi klientelisme dan dominasi elite (Aspinall & Berenschot, 2019).

Data studi literatur diperoleh melalui telaah dokumen resmi pemerintah, data kelembagaan, dan pemberitaan media massa sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Selanjutnya, dilakukan olah data dan analisa data terkait beberapa poin penting seperti penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, praktisi politik, serta organisasi masyarakat sipil.

Kerangka analisis penelitian mengacu pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri atas tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek dianalisis melalui 22 indikator yang kemudian dibandingkan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik untuk mengidentifikasi variasi kualitas demokrasi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 1. Instrumen Kerangka Analisis

Aspek	Variabel/Indikator Utama	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Teknik Analisis
Kebebasan	Kebebasan berpendapat, berserikat, berkeyakinan, pers, dan hak pilih	Media massa, dokumen pemerintah, laporan HAM	Review media, review dokumen, wawancara	Skoring indikator, analisis deskriptif
Kesetaraan	Kesetaraan gender, akses ekonomi, partisipasi politik, akses informasi	Dokumen kebijakan, data statistik, laporan sosial	Review dokumen, FGD	Skoring indikator, analisis komparatif

Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kinerja legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, transparansi	Laporan pemerintah, data kelembagaan	Review dokumen, wawancara mendalam	Skoring indikator, analisis institusional
Komparasi Daerah	Perbandingan kondisi demokrasi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik	Hasil perhitungan indeks	Analisis gabungan	Analisis komparatif

Penilaian setiap indikator dilakukan melalui identifikasi data pada dokumen resmi dan pemberitaan media, kemudian diverifikasi melalui FGD dan wawancara mendalam agar hasil penilaian mencerminkan kondisi empiris di lapangan. Selanjutnya, skor masing-masing indikator dihitung berdasarkan bobot yang ditetapkan dalam metode IDI menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Nilai setiap indikator diakumulasi menjadi indeks pada masing-masing aspek, kemudian dihitung menjadi Indeks Demokrasi daerah melalui rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas (Mitziner, 2008).

Tabel dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Judul Tabel ditulis dari kiri, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan kualitas demokrasi yang cukup signifikan antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil perhitungan, Kabupaten Lamongan memperoleh nilai indeks sebesar 81,18, sedangkan Kabupaten Gresik memperoleh nilai 75,23. Selisih hampir enam poin tersebut mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi di Lamongan berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan Gresik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilihan umum sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, tingkat kesetaraan sosial-politik, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang berkembang di masing-masing daerah.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Aspek	Kabupaten Gresik	Kabupaten Lamongan	Selisih
Kebebasan	79,87	83,27	3,40
Kesetaraan	71,39	79,37	7,98
Kapasitas Lembaga Demokrasi	74,44	80,90	6,46
Indeks Demokrasi Total	75,23	81,18	5,95

Temuan tersebut sekaligus memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara tingkat kompetisi elektoral dan kualitas demokrasi daerah.

DOI:<https://doi.org/10.37058/jipp.v11i2.16993>

E-ISSN: 2776-6284



Kabupaten Lamongan yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan dua pasangan calon memperoleh nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gresik yang hanya memiliki satu pasangan calon. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh adanya kompetisi elektoral. Faktor yang lebih berpengaruh justru berasal dari dimensi demokrasi yang bersifat substantif, seperti efektivitas lembaga demokrasi, pemerataan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, keterbukaan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Schmitter dan Karl (1991) yang menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami melalui keberadaan pemilu yang kompetitif, tetapi harus ditopang oleh institusi yang akuntabel, perlindungan hak-hak warga negara, dan mekanisme pemerintahan yang responsif.

Analisis terhadap ketiga aspek penyusun IDI menunjukkan bahwa aspek kebebasan bukan merupakan faktor utama yang membedakan kualitas demokrasi kedua daerah. Kabupaten Gresik memperoleh skor 79,87, sedangkan Kabupaten Lamongan memperoleh 83,27, yang menempatkan keduanya pada kategori relatif baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, menjalankan keyakinan, maupun memperoleh kebebasan pers pada umumnya telah terjamin. Dengan demikian, rendahnya nilai indeks demokrasi Kabupaten Gresik tidak disebabkan oleh terbatasnya ruang kebebasan sipil, melainkan oleh persoalan lain yang lebih bersifat struktural.

Perbedaan yang paling mencolok justru terdapat pada Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Pada aspek kesetaraan, Lamongan memperoleh nilai 79,37, sedangkan Gresik hanya mencapai 71,39. Hasil Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen, dan wawancara menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya keterlibatan perempuan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan daerah, belum optimalnya pengaruh masyarakat terhadap proses legislasi melalui lembaga perwakilan, tingginya konsentrasi sumber daya ekonomi pada kawasan industri, serta masih adanya kesenjangan kesempatan kerja dan pelayanan dasar antarwilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan akses terhadap sumber daya politik maupun sosial.

Temuan serupa juga terlihat pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, di mana Lamongan memperoleh skor 80,90, sedangkan Gresik memperoleh 74,44. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas institusi demokrasi merupakan salah satu faktor utama yang membentuk variasi nilai indeks demokrasi kedua daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan dinilai lebih berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang responsif melalui peningkatan keterbukaan informasi publik, pelayanan birokrasi yang inklusif, hubungan yang konstruktif dengan media massa, serta koordinasi antarlembaga yang lebih efektif. Sebaliknya, di Kabupaten Gresik masih ditemukan beberapa persoalan yang memengaruhi kualitas demokrasi, seperti praktik politik uang pada tingkat lokal, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, keterbatasan transparansi pada isu-isu strategis seperti tata ruang dan kawasan industri, serta belum meratanya manfaat pembangunan sebagai akibat dari

konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor industri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik apabila tidak disertai tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Gresik bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjelaskan lebih rendahnya kualitas demokrasi daerah tersebut. Fenomena calon tunggal memang berpotensi mengurangi tingkat kompetisi politik dan mekanisme *check and balance*, namun pengaruhnya tidak berdiri sendiri. Rendahnya nilai demokrasi di Gresik lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan demokrasi substantif yang bersifat struktural, seperti belum optimalnya pemerataan akses politik, dominasi aktor ekonomi dalam struktur pembangunan daerah, terbatasnya ruang partisipasi publik yang bermakna, serta kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu menjamin proses demokrasi yang inklusif. Temuan ini memperkuat argumentasi Aspinall dan Berenschot (2019) bahwa kualitas demokrasi lokal di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh relasi patronase, distribusi kekuasaan, dan kapasitas institusional dibandingkan hanya oleh tingkat kompetisi elektoral.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Gresik karena mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan efektivitas kelembagaan demokrasi. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan dalam mengonversi keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi demokrasi yang lebih inklusif dan substantif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Gresik memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan mekanisme elektoral, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, perluasan representasi kelompok rentan, pengurangan praktik politik transaksional, serta pemerataan manfaat pembangunan sehingga demokrasi yang berkembang tidak berhenti pada dimensi prosedural, melainkan mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan.

Hasil penelitian menghasilkan beberapa temuan pokok. Pertama, perbedaan kualitas demokrasi antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan terutama dipengaruhi oleh aspek Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, sedangkan aspek Kebebasan menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada kedua daerah. Kedua, praktik politik uang masih menjadi salah satu hambatan utama bagi penguatan demokrasi substantif di Kabupaten Gresik. Ketiga, keterlibatan perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan daerah belum berjalan secara optimal sehingga ruang partisipasi publik masih belum sepenuhnya inklusif. Keempat, konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan industri turut memengaruhi munculnya ketimpangan akses terhadap kesempatan kerja, sumber daya ekonomi, dan pelayanan dasar antarwilayah. Kelima, transparansi pemerintahan, khususnya pada isu tata ruang dan pengelolaan kawasan industri, masih memerlukan penguatan. Keenam, fenomena calon tunggal bukan merupakan penyebab tunggal rendahnya kualitas demokrasi di Gresik, tetapi lebih merupakan bagian dari persoalan kelembagaan dan tata kelola demokrasi yang lebih luas. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, pemerataan pembangunan, serta efektivitas institusi demokrasi sehingga menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih tinggi.



Temuan Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 menunjukkan bahwa aspek kebebasan merupakan dimensi dengan capaian tertinggi pada kedua daerah yang diteliti. Kabupaten Lamongan memperoleh skor 83,27, sedangkan Kabupaten Gresik mencapai 79,87, sehingga terdapat selisih 3,40 poin. Dibandingkan dengan aspek kesetaraan maupun kapasitas lembaga demokrasi, perbedaan pada dimensi kebebasan relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah pada umumnya telah mampu menjamin hak-hak sipil masyarakat, meliputi kebebasan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, menjalankan keyakinan, menggunakan hak politik, memperoleh perlindungan hak-hak pekerja, serta menjalankan aktivitas pers secara relatif bebas. Dengan demikian, variasi nilai Indeks Demokrasi antara kedua kabupaten tidak terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat kebebasan sipil, melainkan lebih dipengaruhi oleh dimensi kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi.

Tabel 3. Perbandingan Temuan Aspek Kebebasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Indikator Utama	Kabupaten Gresik	Kabupaten Lamongan
Nilai Aspek Kebebasan	79,87	83,27
Kebebasan berkumpul dan berpendapat	Terjamin dan difasilitasi pemerintah daerah	Terjamin dengan dukungan stabilitas sosial yang tinggi
Hubungan antar masyarakat	Toleransi relatif baik, namun dinamika sosial lebih kompleks akibat industrialisasi	Kohesi sosial kuat, konflik horizontal sangat rendah
Kebebasan berkeyakinan	Kondusif, didukung FKUB dan dialog lintas agama	Sangat kondusif dengan modal sosial toleransi yang kuat
Hak memilih dan dipilih	Terjamin meskipun Pilkada diikuti calon tunggal	Terjamin dengan kompetisi elektoral yang lebih tinggi
Hak pekerja	Perlindungan sektor formal baik, namun pekerja informal dan outsourcing masih menghadapi tantangan	Perlindungan pekerja rentan terus diperluas, terutama petani dan nelayan
Kebebasan pers	Tidak ditemukan pembatasan sistematis, namun akses informasi isu strategis masih terbatas	Hubungan pemerintah dan media lebih terbuka serta didukung keterbukaan informasi publik

Temuan tersebut mendukung kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini bahwa demokrasi merupakan konsep yang bersifat multidimensional. Menurut Dahl (1971), demokrasi modern mensyaratkan adanya kebebasan berorganisasi dan partisipasi politik yang luas, sedangkan Schmitter dan Karl (1991) menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak sipil merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem demokrasi yang berkualitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Kabupaten Gresik maupun Kabupaten Lamongan telah menyediakan ruang yang relatif aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, melaksanakan kegiatan sosial maupun politik, serta mengekspresikan aspirasi di ruang publik. Dengan demikian, salah satu karakteristik utama *polyarchy* sebagaimana dikemukakan Dahl (1971) telah berkembang dengan cukup baik di kedua wilayah.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan telaah dokumen, kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat memperoleh capaian yang relatif tinggi pada kedua daerah. Aparat pemerintah maupun aparat keamanan dinilai memberikan ruang yang cukup terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, forum diskusi, maupun aktivitas organisasi kemasyarakatan. Di Kabupaten Gresik, berbagai kelompok masyarakat, akademisi, dan organisasi keagamaan menilai pemerintah daerah cukup akomodatif terhadap aktivitas masyarakat sipil. Kondisi yang sama juga ditemukan di Kabupaten Lamongan, di mana stabilitas sosial-politik yang terjaga memungkinkan masyarakat menjalankan hak-hak sipil tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi yang berarti. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi negara dalam melindungi kebebasan sipil telah berjalan secara efektif di kedua kabupaten.

Penelitian juga menemukan bahwa hubungan horizontal antarwarga menjadi salah satu faktor yang membedakan capaian kedua daerah. Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat kohesi sosial yang lebih kuat melalui rendahnya konflik horizontal, tingginya toleransi, serta berkembangnya budaya dialog dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan Desa Balun yang dikenal sebagai "Desa Pancasila" menjadi representasi kuatnya praktik toleransi sosial di daerah tersebut. Modal sosial tersebut memperkuat kemampuan masyarakat dalam menerima perbedaan pandangan politik maupun keyakinan agama tanpa menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas demokrasi. Sebaliknya, Kabupaten Gresik juga memperlihatkan tingkat toleransi yang baik, namun karakter wilayah yang lebih heterogen akibat perkembangan industri dan urbanisasi menyebabkan dinamika sosial menjadi lebih kompleks sehingga memerlukan kapasitas pengelolaan konflik yang lebih besar.

Pada indikator kebebasan berkeyakinan, kedua kabupaten menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Penelitian tidak menemukan adanya kasus yang mengindikasikan pembatasan sistematis terhadap kebebasan beragama ataupun diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat terbukti berkontribusi dalam menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama. Meskipun demikian, Kabupaten Lamongan memperoleh capaian yang sedikit lebih tinggi karena keberhasilannya membangun budaya toleransi yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan, toleransi, dan kerja sama antarwarga. Hasil tersebut sejalan dengan pandangan



Diamond (2015) yang menempatkan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

Pada indikator hak memilih dan dipilih, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik masyarakat secara umum telah terjamin di kedua daerah meskipun konteks elektoralnya berbeda. Kabupaten Gresik menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan satu pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong, sedangkan Kabupaten Lamongan menghadirkan dua pasangan calon. Menariknya, kondisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap skor aspek kebebasan. Masyarakat di Kabupaten Gresik tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan yang berarti dan proses pemilihan berlangsung secara kondusif. Namun demikian, hasil FGD mengungkapkan bahwa fenomena calon tunggal lebih berkaitan dengan meningkatnya dominasi elite politik dan tingginya biaya politik yang kemudian memengaruhi kualitas demokrasi pada aspek kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi elektoral bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas demokrasi lokal.

Perbedaan skor kedua daerah juga dipengaruhi oleh indikator pemenuhan hak pekerja dan kebebasan pers. Sebagai kawasan industri utama di Jawa Timur, Kabupaten Gresik menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan Lamongan. Perlindungan terhadap pekerja sektor formal telah berjalan relatif baik melalui pemenuhan upah minimum dan jaminan sosial, namun pekerja sektor informal, buruh kontrak, dan tenaga alih daya masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh perlindungan yang setara. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan yang memiliki struktur ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan UMKM memperlihatkan hubungan industrial yang lebih stabil serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan, terutama petani dan nelayan. Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut turut menjelaskan mengapa Lamongan memperoleh skor yang sedikit lebih tinggi pada aspek kebebasan.

Pada indikator kebebasan pers, kedua daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Penelitian tidak menemukan adanya praktik pembatasan sistematis maupun intimidasi langsung terhadap aktivitas jurnalistik. Namun demikian, terdapat perbedaan pada kualitas hubungan antara pemerintah daerah dan media massa. Kabupaten Lamongan menunjukkan hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta organisasi pers yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang konsisten. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih menghadapi kendala berupa lambatnya penyediaan informasi pada isu-isu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kawasan industri, tata ruang, dan aktivitas korporasi besar. Selain itu, tingginya dinamika ekonomi dan politik lokal juga berpotensi memengaruhi independensi media melalui meningkatnya pengaruh kepentingan ekonomi maupun politik. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum menunjukkan adanya pembatasan yang secara langsung mengurangi kebebasan pers.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan Kabupaten Lamongan pada aspek kebebasan merupakan hasil dari kombinasi antara stabilitas sosial, tingginya toleransi masyarakat, rendahnya konflik horizontal, serta konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin ruang kebebasan sipil. Di sisi lain, Kabupaten Gresik tetap

menunjukkan capaian yang baik, namun kompleksitas wilayah industri menghadirkan tantangan yang lebih besar, terutama dalam perlindungan pekerja, keterbukaan informasi pada sektor-sektor strategis, serta pengelolaan hubungan antara kepentingan ekonomi dan kebebasan publik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi di kedua daerah telah berkembang melampaui dimensi prosedural menuju perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Namun demikian, penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor industri dan pelayanan publik, tetap diperlukan agar kualitas kebebasan sipil di Kabupaten Gresik dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Aspek Kesenjangan Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 memperlihatkan bahwa aspek kesetaraan merupakan dimensi yang paling menentukan perbedaan kualitas demokrasi antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memperoleh skor 79,37, sedangkan Kabupaten Gresik memperoleh 71,39, sehingga terdapat selisih 7,98 poin, yang merupakan perbedaan terbesar dibandingkan aspek kebebasan maupun kapasitas lembaga demokrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variasi kualitas demokrasi di kedua daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan daripada sekadar menjamin kebebasan sipil. Kondisi ini sejalan dengan kerangka Indeks Demokrasi Indonesia yang menempatkan kesetaraan sebagai fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil dalam kehidupan politik dan sosial (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022).

Tabel 4. Perbandingan Temuan Aspek Kesenjangan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Indikator Utama	Kabupaten Gresik	Kabupaten Lamongan
Nilai Aspek Kesenjangan	71,39	79,37
Kesenjangan gender	Keterlibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan masih terbatas	Organisasi perempuan aktif dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan
Partisipasi masyarakat	Mekanisme partisipasi tersedia, namun pengaruh terhadap kebijakan masih rendah	Forum partisipatif lebih efektif dan aspirasi masyarakat lebih terakomodasi
Struktur ekonomi	Didominasi kawasan industri sehingga terjadi konsentrasi sumber daya ekonomi	Ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan UMKM lebih merata

Perlindungan sosial	Belum merata pada kelompok pekerja informal dan wilayah tertentu	Perlindungan sosial bagi petani, nelayan, dan pekerja informal lebih luas
Kesempatan kerja dan pelayanan dasar	Masih terdapat kesenjangan antarwilayah	Distribusi pelayanan publik dan kesempatan kerja relatif lebih merata
Akses informasi publik	Daerah informatif, namun respons pada isu strategis masih perlu ditingkatkan	Keterbukaan informasi lebih konsisten dan dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik

Apabila dikaitkan dengan kerangka teoritis penelitian, hasil ini memperkuat pandangan bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dinilai hanya melalui keberhasilan penyelenggaraan pemilu ataupun tingginya tingkat partisipasi pemilih. Menurut Dahl (1971), demokrasi mensyaratkan partisipasi politik yang luas, sedangkan Schmitter dan Karl (1991) menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas juga ditentukan oleh adanya kesetaraan akses terhadap proses politik serta institusi yang mampu melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya skor kesetaraan di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi secara prosedural telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan distribusi kesempatan yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan memperlihatkan perkembangan demokrasi yang lebih inklusif melalui kombinasi antara pemerataan pelayanan publik, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan akses yang lebih terbuka terhadap proses pengambilan kebijakan.

Pada dimensi kesetaraan gender, penelitian menemukan adanya perbedaan yang cukup jelas antara kedua daerah. Di Kabupaten Gresik, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif telah dilaksanakan secara administratif, namun hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki ruang yang terbatas dalam memengaruhi proses penyusunan kebijakan strategis daerah. Kondisi tersebut terlihat dari masih minimnya keterlibatan perempuan dalam pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun forum konsultasi publik. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya politik, kuatnya budaya patriarki, serta dominasi elite politik lokal. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan menunjukkan praktik yang lebih inklusif melalui pelibatan organisasi perempuan, seperti Muslimat NU, Aisyiyah, PKK, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam forum Musrenbang maupun perencanaan pembangunan lainnya. Dengan demikian, keunggulan Lamongan tidak hanya tercermin pada representasi formal perempuan, tetapi juga pada besarnya ruang partisipasi perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.

Perbedaan lain tampak pada efektivitas partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Kabupaten Gresik telah menyediakan berbagai mekanisme partisipasi, seperti Musrenbang, reses DPRD, dan forum konsultasi publik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok perempuan, belum sepenuhnya

Kharisma, M. Billy, M. Mukhobbir

Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Lamongan tahun 2025

terakomodasi dalam proses legislasi maupun penyusunan kebijakan daerah. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan memperlihatkan hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga perwakilan, dan masyarakat melalui forum-forum partisipatif yang secara konsisten melibatkan organisasi keagamaan, kelompok masyarakat, serta komunitas lokal. Tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal yang kemudian diikuti oleh terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan warga dalam perumusan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka partisipasi dalam pemilu, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan setelah proses elektoral berlangsung.

Dari sisi kesetaraan ekonomi, karakteristik pembangunan di kedua daerah memberikan implikasi yang berbeda terhadap kualitas demokrasi. Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri utama di Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor industri berskala besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi korporasi besar dalam pemanfaatan lahan, investasi, dan aktivitas produksi menyebabkan distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM, nelayan, maupun masyarakat di kawasan nonindustri. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM memiliki distribusi aktivitas ekonomi yang relatif lebih merata. Meskipun nilai tambah ekonominya tidak sebesar Gresik, struktur ekonomi tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif tanpa dominasi kelompok usaha tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Perbedaan kualitas kesetaraan juga terlihat pada perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan kesempatan kerja antarwilayah. Kabupaten Lamongan dinilai lebih berhasil memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk petani, nelayan, dan pekerja sektor informal, sekaligus menjaga pemerataan pelayanan publik hingga wilayah pedesaan. Selain itu, distribusi kesempatan kerja relatif lebih merata karena struktur ekonomi berkembang pada berbagai sektor dan wilayah. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih menghadapi ketimpangan antara kawasan industri dengan wilayah pinggiran maupun kepulauan, sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Konsentrasi lapangan kerja formal pada kawasan industri menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja dan kualitas pelayanan publik di luar kawasan tersebut masih cukup nyata. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas demokrasi apabila pemerataan manfaat pembangunan belum tercapai.

Pada indikator akses informasi publik, kedua daerah sama-sama menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan predikat sebagai daerah informatif. Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi di Kabupaten Lamongan dinilai lebih konsisten, baik dalam penyediaan informasi publik maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan berupa lambatnya penyediaan informasi pada isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan tata ruang, kawasan industri, dan kebijakan pembangunan. Walaupun perbedaannya tidak sebesar indikator lain, kualitas implementasi keterbukaan informasi tetap memberikan kontribusi terhadap perbedaan skor aspek kesetaraan kedua daerah.



Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan Kabupaten Lamongan pada aspek kesetaraan merupakan hasil akumulasi berbagai indikator yang saling mendukung, mulai dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerataan pelayanan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga struktur ekonomi yang lebih inklusif. Sebaliknya, rendahnya skor Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa keberhasilan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi Diamond (2015) bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi politik dalam menciptakan keadilan sosial, memperluas inklusi politik, dan mengurangi berbagai bentuk eksklusi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penguatan demokrasi di Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada perluasan partisipasi masyarakat, peningkatan representasi kelompok rentan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Temuan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 menunjukkan bahwa kapasitas lembaga demokrasi merupakan dimensi kedua yang paling berkontribusi terhadap perbedaan kualitas demokrasi antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik setelah aspek kesetaraan. Kabupaten Lamongan memperoleh skor 80,90, sedangkan Kabupaten Gresik memperoleh 74,44, sehingga terdapat selisih 6,46 poin. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh adanya kebebasan sipil maupun penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tetapi juga oleh kemampuan institusi demokrasi dalam menjalankan fungsi representasi, akuntabilitas, transparansi, pelayanan publik, dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Temuan ini selaras dengan pandangan Schmitter dan Karl (1991) yang menegaskan bahwa demokrasi akan berjalan efektif apabila institusi politik mampu menjamin akuntabilitas pemerintah serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Tabel 5. Perbandingan Temuan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Indikator Utama	Kabupaten Gresik	Kabupaten Lamongan
Nilai Kapasitas Lembaga Demokrasi	74,44	80,90
Kinerja legislatif	Fungsi legislasi berjalan, namun pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih terbatas	Legislasi lebih partisipatif melalui Musrenbang dan forum konsultasi publik

Transparansi pemerintahan	Regulasi keterbukaan informasi tersedia, tetapi implementasi pada isu strategis belum optimal	PPID aktif, digitalisasi pelayanan berkembang, keterbukaan informasi lebih konsisten
Pelayanan publik dan birokrasi	Pelayanan berkembang, tetapi masih terjadi ketimpangan antarwilayah	Pelayanan publik lebih merata hingga tingkat kecamatan dan desa
Pendidikan politik	Masih didominasi aktivitas menjelang pemilu	Pendidikan politik berlangsung lebih berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai aktor
Tata kelola lingkungan	Kompleksitas kawasan industri meningkatkan tantangan tata kelola	Tekanan lingkungan relatif lebih rendah sehingga tata kelola lebih mudah dikendalikan
Kolaborasi kelembagaan	Koordinasi antaraktor demokrasi masih memerlukan penguatan	Hubungan pemerintah, DPRD, media, dan masyarakat lebih kolaboratif

Temuan ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara kompetisi elektoral dan kualitas demokrasi. Meskipun Kabupaten Lamongan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan dua pasangan calon, sedangkan Kabupaten Gresik hanya diikuti satu pasangan calon, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kualitas demokrasi lebih banyak ditentukan oleh efektivitas lembaga-lembaga demokrasi setelah proses elektoral berlangsung. Dengan kata lain, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingkat kompetisi dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan institusi politik menjalankan fungsi representasi, pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintahan. Hasil ini memperkuat konsep *polyarchy* yang dikemukakan Dahl (1971) sekaligus mendukung argumentasi Aspinall dan Berenschot (2019) bahwa kualitas demokrasi lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi serta relasi kekuasaan yang berkembang di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan telaah dokumen, kinerja lembaga legislatif menjadi salah satu indikator yang membedakan kedua daerah. Di Kabupaten Lamongan, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain menghasilkan produk hukum, proses pembentukan kebijakan juga relatif lebih terbuka terhadap masukan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun berbagai forum konsultasi publik. Sebaliknya, di Kabupaten Gresik meskipun fungsi legislasi telah berjalan sesuai ketentuan formal, kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih dinilai belum optimal. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok perempuan masih memandang bahwa ruang untuk memengaruhi substansi kebijakan belum sepenuhnya terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga legislatif tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan, tetapi juga dari tingkat representasi dan keterbukaannya terhadap aspirasi publik.



Pada indikator transparansi pemerintahan, Kabupaten Lamongan memperlihatkan capaian yang lebih baik melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), digitalisasi pelayanan publik, serta penyediaan informasi pemerintahan yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kabupaten Gresik juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Namun demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada beberapa isu strategis, seperti tata ruang, kawasan industri, analisis dampak lingkungan, dan proyek pembangunan berskala besar, proses penyediaan informasi kepada masyarakat masih dipersepsikan kurang responsif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Gresik tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada konsistensi pelaksanaan prinsip transparansi dalam isu-isu yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang tinggi.

Penelitian juga menemukan bahwa kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingginya skor Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah dinilai berhasil mengembangkan pelayanan publik yang relatif merata hingga tingkat kecamatan dan desa melalui inovasi pelayanan administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi tersebut memperkuat efektivitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga meningkatkan legitimasi institusi demokrasi di tingkat lokal. Sebaliknya, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan yang lebih kompleks sebagai daerah industri dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Pertumbuhan kawasan industri meningkatkan kebutuhan pelayanan publik yang belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan kapasitas birokrasi di seluruh wilayah. Akibatnya, kualitas pelayanan di kawasan perkotaan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah pinggiran maupun kepulauan.

Pada indikator pendidikan politik dan penguatan kelembagaan partai politik, kedua daerah juga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Lamongan memperlihatkan pendidikan politik yang lebih berkesinambungan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan partai politik dalam meningkatkan literasi demokrasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mencerminkan efektivitas proses tersebut. Sebaliknya, di Kabupaten Gresik pendidikan politik masih cenderung berorientasi pada momentum pemilu sehingga belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan maupun proses legislasi setelah pemilu selesai. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Aspek lain yang turut memengaruhi kapasitas lembaga demokrasi adalah tata kelola lingkungan hidup. Karakteristik Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri menyebabkan persoalan tata ruang, aktivitas industri, dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan. Pada beberapa kasus, masyarakat menilai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu lingkungan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara optimal sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan yang memiliki struktur ekonomi berbasis pertanian dan perikanan menghadapi tekanan lingkungan yang relatif lebih rendah sehingga

pemerintah daerah dapat lebih memfokuskan sumber dayanya pada penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompleksitas pembangunan ekonomi memiliki konsekuensi terhadap kapasitas kelembagaan demokrasi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keunggulan Kabupaten Lamongan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, DPRD, penyelenggara pemilu, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat efektivitas institusi demokrasi. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, memperkuat transparansi pada sektor-sektor strategis, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Temuan ini memperkuat pandangan Diamond (2015) bahwa tantangan utama demokrasi modern terletak pada kemampuan institusi negara menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik di tengah meningkatnya kompleksitas politik maupun ekonomi.

Dengan demikian, rendahnya skor kapasitas lembaga demokrasi di Kabupaten Gresik tidak mencerminkan lemahnya keberadaan institusi demokrasi, melainkan menunjukkan bahwa efektivitas institusi tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsi demokrasi secara lebih substantif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada penguatan fungsi representasi DPRD, peningkatan transparansi pengambilan keputusan, pengembangan pendidikan politik yang berkelanjutan, perbaikan tata kelola lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas birokrasi yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat industri. Sementara itu, Kabupaten Lamongan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan antaraktor demokrasi agar kualitas demokrasi lokal tetap terjaga pada masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berkembang dengan karakteristik yang berbeda meskipun keduanya berada dalam konteks sosial, politik, dan administratif yang relatif serupa di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan pendekatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Kabupaten Lamongan memperoleh nilai 81,18, sedangkan Kabupaten Gresik memperoleh 75,23. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh interaksi berbagai dimensi demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui tingkat kompetisi elektoral.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aspek kebebasan bukan merupakan faktor utama yang membedakan kualitas demokrasi kedua daerah. Kedua kabupaten telah mampu menjamin kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, kebebasan pers, serta hak politik warga negara. Perbedaan skor yang relatif kecil



pada aspek ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak sipil telah berkembang dengan cukup baik, sehingga variasi nilai demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat struktural dan kelembagaan dibandingkan oleh pembatasan terhadap kebebasan masyarakat.

Sebaliknya, aspek kesetaraan menjadi dimensi yang paling menentukan perbedaan kualitas demokrasi antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian yang lebih baik dalam membangun demokrasi yang inklusif melalui perluasan partisipasi masyarakat, penguatan keterlibatan perempuan dan organisasi masyarakat, pemerataan pelayanan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta distribusi kesempatan ekonomi yang lebih merata. Di sisi lain, Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, terbatasnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, serta belum meratanya manfaat pembangunan akibat karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor industri. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas demokrasi apabila tidak disertai pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh warga.

Selain itu, kapasitas lembaga demokrasi juga terbukti menjadi faktor yang membedakan kualitas demokrasi kedua daerah. Kabupaten Lamongan memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif melalui birokrasi yang adaptif, transparansi informasi publik, pelayanan publik yang lebih merata, serta kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, DPRD, penyelenggara pemilu, media massa, dan masyarakat sipil. Sebaliknya, Kabupaten Gresik masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi, kualitas representasi lembaga legislatif, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta tata kelola kebijakan di sektor-sektor strategis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas institusi demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun demokrasi yang substantif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetisi elektoral bukan merupakan satu-satunya determinan kualitas demokrasi lokal. Meskipun Kabupaten Gresik menyelenggarakan Pilkada dengan satu pasangan calon dan Kabupaten Lamongan memiliki dua pasangan calon, perbedaan kualitas demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola pemerintahan, tingkat kesetaraan sosial, dan kapasitas institusi demokrasi. Temuan ini memperkuat pemikiran Dahl (1971) mengenai pentingnya institusi dalam menopang *polyarchy* sekaligus mendukung pandangan Schmitter dan Karl (1991) bahwa demokrasi harus dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan kebebasan sipil, kesetaraan politik, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan secara bersamaan.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian demokrasi lokal dengan menunjukkan bahwa pengukuran demokrasi pada tingkat kabupaten mampu menangkap dinamika yang tidak selalu terlihat pada pengukuran tingkat provinsi maupun nasional. Variasi skor antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan masing-masing daerah. Oleh karena itu, pengukuran demokrasi pada level lokal

dapat menjadi instrumen evaluasi yang lebih sensitif dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada penguatan dimensi kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi melalui perluasan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan representasi perempuan dan kelompok rentan, penguatan transparansi pemerintahan, pengembangan pendidikan politik yang berkelanjutan, serta pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah. Sementara itu, Kabupaten Lamongan perlu mempertahankan capaian yang telah diraih dengan terus memperkuat inovasi tata kelola pemerintahan, menjaga kohesi sosial, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar kualitas demokrasi tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi lokal yang berkualitas merupakan hasil dari keseimbangan antara perlindungan kebebasan sipil, pemerataan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, serta efektivitas lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsi representasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme elektoral, tetapi juga memerlukan pembangunan institusi yang inklusif, transparan, dan responsif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Jawa Timur. (2024). *KPU Lamongan tetapkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 meningkat*. <https://jatim.antaranews.com>
- Antara Jawa Timur. (2024). *KPU Gresik tetapkan hasil Pilkada 2024*. <https://jatim.antaranews.com>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. (2024). *Focus Group Discussion Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Gresik*. Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. (2024). *Forum Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Lamongan*. Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Demokrasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Beetham, D. (1994). *Defining and Measuring Democracy*. SAGE Publications.



-
- Beritajatim.com. (2024). *Gresik dorong penguatan demokrasi melalui Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia*. <https://beritajatim.com>
- Beritajatim.com. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Lamongan dinilai tinggi*. <https://beritajatim.com>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>
- Fajri, H., Wahyuni, N., Saputra, B., & Maani, K. D. (2021). Demokrasi pincang: Analisis terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat pasca reformasi. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 108–120.
- Kelsen, H. (1952). Foundations of democracy. *Ethics*, 66(1), 1–101. <https://doi.org/10.1086/290945>
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2024). *Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024*. <https://komisiinformasi.jatimprov.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024*. <https://kab-gresik.kpu.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024*. <https://kab-lamongan.kpu.go.id>
- Lincoln, A. (1863). *Gettysburg Address*.
- Munck, G. L., & Verkuilen, J. (2002). Conceptualizing and measuring democracy: Evaluating alternative indices. *Comparative Political Studies*, 35(1), 5–34. <https://doi.org/10.1177/001041400203500101>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Rahmatullah. (2019). Wajah demokrasi Jakarta dalam potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112–116.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0033>
- TribunJatim.com. (2024). *Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Gresik menjadi perhatian pengamat politik*. <https://jatim.tribunnews.com>
- TribunJatim.com. (2024). *Lamongan pertahankan kondusivitas selama tahapan Pilkada 2024*. <https://jatim.tribunnews.com>
- Zainal Abidin Achmad, Z. A., Siswati, E., & Wahyudi, A. (2020). *Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018*. Indomedia Pustaka.
-